BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang penulis jadikan acuan dalam tinjauan pustaka adalah Skripsi Minguel Ramos Oliveira tahun 2006, yang berjudul *Analisis Timor Leste Dalam Organisasi Comunidade Dos Países de Língua Portuguesa* (CPLP**)**. Karya ini penulis rujuk karena merupakan satu dari sedikit kajian yang membahas kerjasama yang dilakukan oleh Timor Leste dan CPLP dalam kerangka kerja sama Pendidikan. Minguel membahas mengapa Timor Leste ingin masuk dalam organisasi CPLP.

Minguel memang hanya memfokuskan penelitiannya pada analisis kepentingan Timor Leste masuk dalam CPLP, sebagaimana yang akan dilakukan penulis. Minguel menjelaskan secara detail, terperinci, sekaligus sistematis dan kebijakan pemerintah untuk bergabung dalam CPLP. Minguel menjelaskan keinginan TL bergabung dengan CPLP sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keamanan bangsa dan negara. Bagi Timor Leste, dengan menjadi salah satu anggota CPLP, justru akan lebih memberikan akses ke Uni-Eropa melalui Portugal, ke Afrika melalui Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Sao Tome dan Principe, dan Cabo Verde dan ke Amerika Selatan melalui Brasil. Akses tersebut dapat dijadikan sebagai suatu modal untuk mendapatkan pengakuan dan membangun kemitraan global berdasarkan kepentingan regional, memperkuat

kerja sama regional yang kooperatif dan kompetitif demi mempertahankan bangsa di arena pergulatan politik internasional.

Minguel menggunakan teori kepentingan nasional (*national interest*) yang disampaikan oleh Hans J. Morgenthau dimana kepentingan nasional (*national interest*) sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang relatif tetap sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya, dan kebutuhan wilayah, serta kesejahteraan. Menurut Morgenthau kedua hal pokok ini, yakni keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) merupakan dasar bagi negara dalam menetapkan kepentingan nasionalnya.

Sementara itu, Skripsi Antonoi Ramos tahun 2010 yang berjudul *Kerja sama Australia – Timor Leste Di Bidang Pendidikan Melalui ADS (Australian Development Scholarships)* yang mengkaji tentang kebijakan yang ditawarkan oleh Pemerintah Australia untuk memberikan kesempatan bagi warga Timor Timur untuk belajar di Australia dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dan rekonstruksi Timor-Leste. Antonoi menjelaskan bagaimana peluang bagi pemuda-pemudi dalam melanjutkan pendidikan di Australia.

Australia memberikan kesempatan bagi TL dan Pelamar harus warga negara Timor Leste yang ingin melanjutkan studi di Perguruan Tinggi atau Universitas di Australia. Semua pelamar harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik dan harus berkomitmen untuk kembali ke Timor - Leste setelah studi mereka. Antoni menjelaskan kerjasama Astralia-TL melalui program ADS merupakan

suatu potensi sepenuhnya bagi masyrakat TL sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Timor leste.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, keamanan militer dan ekonomi. Secara umum konsep kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur yang sangat vital bagi negara dan menjadi pedoman bagi para pembuat keputusan disuatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling menjadi kebutuhannya secara umum termasuk hak untuk memperthankan negaranya sendiri (1973:20).

Dari gambaran tentang konsep Kepentingan Nasional, baik yang tertuang dalam pemikiran Hans J. Morgenthau, maupun Jack C. Plano dan Roy Olton, setidaknya penjelasan yang dapat diangkat sebagai alasan utama terkait "kepentingan Timor Leste bergabung dengan komunitas negara-negara berbahasa Portugis" adalah bahwa, mempertahankan kelangsungan hidup negara, dan kedaulatan negara, keamanan militer serta ekonomi, menjadi alasan-alasan utama bagi para pembuat keputusan dalam pemerintah Timor Leste untuk bergabung dengan komunitas negara-negara berbahasa Portugis demi mengupayakan tercapainya kepentingan-kepentingan di bidang politik dan ekonomi.

Misalnya pernyataan dari Ramos Horta pada tahun 2000 selaku Menteri Luar Negeri Pemerintahan Transisi Timor Leste oleh PBB, pada saat diwawancarai koresponden TEMPO *Interaktif*, Antonio Naikoli, di Lisabon, Portugal, yang menyatakan bahwa;

> "Secara strategis Timor Lorosae harus menciptakan hubungan baik dengan semua negara: baik ASEAN, APEC, FPS, dan CPLP (komunitas negara-negara berbahasa Portugis). Timor Lorosae akan menjadi pintu gerbang bagi

> negara-negara berbahasa Portugis untuk masuk di ASEAN. Dan dengan menjadi anggota CPLP, kami bisa lebih memiliki akses ke Uni-Eropa melalui Portugal. Ke Afrika, (akses kami) melalui negara Afrika berbahasa Portugis (Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Sao Tome dan Principe, dan Cabo Verde). Melalui Brasil, kami memiliki hubungan dengan negara-negara Amerika Selatan. Dengan menjadi anggota APEC, kami menjadi mitra Amerika Serikat,canada, negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru".

Pernyataan ini merupakan bukti bahwa, sebagai negara baru yang kecil, tentu saja Timor Leste membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain. Dengan menjadi salah satu anggota CPLP, Timor Leste sudah secara tidak langsung diakui sebagai negara berdaulat dan diberikan kesempatan untuk memperluas hubungan diplomatik guna membangun kemitraan global berdasarkan kepentingan regional, memperkuat kerja sama regional yang kooperatif dan kompetitif dengan negara-negara anggota CPLP lainnya. Selain itu, dengan bergabung dengan CPLP, Timor Leste juga dapat semakin memperluas cakupan bidang kerja sama regionalnya dengan negara-negara lain,

Pendekatan atau metode yang dipakai metode penelitian kualitatif, strategi penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian analisis kualitatif digunakan untuk menemukan adanya hubungan antara variabel yang ada, memahami dan menginterpretasikan hubungan dari variabel-variabel tersebut sehingga akhirnya dapat memberikan pembuktian terhadap hipotesa dan dapat ditarik satu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Minguel mengambil data dari berbagai sumber sekunder, seperti buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berbentuk elektronik (yang bisa didapat melalui instrumen internet).

Sebagaimana yang juga dilakukan oleh penulis namun berbeda dengan Minguel yang hanya meneliti sampai kepada alasan Timor Leste ingin bergabung dengan CPLP , penulis turut pula menggunakan sumber-sumber data tersebut untuk menganalisis mengenai peranan CPLP dalam kualitas pendidikan di Timor Leste.

Minguel menggunakan hipotesa bahwa hal yang menjadi alasan bahwa, kepentingan Timor Leste untuk bergabung dengan Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) pada kepentingan politiknya agar mendapatkan bantuan-bantuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah, keamanan bangsa dan negara, dan membangun stabilitas nasional sebagai sebuah negara yang baru merdeka sedangkan pada kepentingan ekonomi sebagai upaya untuk mendapatkan bantuan-bantuan ekonomi demi memulihkan dan membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu studi yang mempelajari aspek-aspek kehidupan yang melintas batasan-batasan negara nasional. Hubungan ini sering di sebut sebagai hubungan transnasional karena batas-batas kedaulatan suatu negara seolah-olah telah hilang atau dilangar oleh hubungan yang ada. hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, nation-state, maupun organisasi-organisasi internasional yang sifatnya lintas batas.

Mengetahui hakikat dari hubungan antara aktor dalam percaturan hubungan internasional, maka kita harus membedah apa yang disebut interaksi internasional. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya hubungan tersebut merupakan suatu bentuk interaksi internasional.

Menurut Charles Mc Clelland, dalam Perwita dan Yani, mendefenisikan bahwa hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan releven yang mengelilingi interaksi (2005 :4).

Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarkat negara–negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan meliputi segala seni hubungan internasional di antara berbagai negara di dunia. Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of World Politic*s mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang di gunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.

Seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan. Yanyan Mochamad Yani untuk mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* yaitu:

> “Tujuan dasar hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasionla. Perilaku ini bisa berjuwud kejasama,

> pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi dalam organisasi internasional"(2005:4-5).

Hal yang membawa dampak bagi studi hubungan internasional. Salah satu metode popular yang digunakan untuk menganalisis kecenderungan hubungan internasional kontemporer adalah dengan melihat pola-pola hubungan yang mengindikasikan adanya kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) dalam semua aspek hubungan internasional seperti yang diyatakan oleh Toma dan Gorman bahwa :

> "Faktor pendukung utama untuk kesinambungan (*continuity)* hubungan internasional adalah aktor Negara-bangsa, yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk meraih kepentingan nasional, berupaya untuk mempertahankan perananya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Sedangkan pendukung perubahan (*change*) adalah globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, ancaman terhadap lingkungan hidup, peningkatan *power* dan *influence* dari aktor non-negara (Toma & Gorman, 1991:.23)".

Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan antara negara saja melainkan juga aktor-aktor lain yang juga mempunyai peranan berpengaruh dalam hubungan internasional. Aktor-aktor lain tersebut misalnya organisasi internasional, *multinational corporations* (MNCs), organisasi lingkungan, kelompok-kelompok teroris, yang semuanya merupakan bagian dari politik dunia. Interaksi yang kompleks dan melintas batas negara itu membuat batasan-batasan politik tidak lagi menjadi penghalang efektif dalam hubungan internasional. Sebagai gambaran umum perkembangan hubungan internasional dari tahun 1940-an akhir 1990an.

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis. Mochtar Mas'oed menyatakan bahwa peranan (role) adalah perilaku yang di harapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi di suatu struktur yang menjalangkan fungsi-fungsinya dalam pencapaian suatu tujuan kemasyarakatan.

2. Pengaruh

   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dengan kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *out-comes*.

3. Kerjasama

   Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang di peroleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

4. Analisis Sistem

   Makna sistem yaitu adanya suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berkaitan secara fungsional satu sama lain di

dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Dalam studi hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhan tidak dapat di bagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani,2005:29-34).

Mc.Clelland mendefenisikan Hubungan Internasional dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, menyatakan bahwa:

> "Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan releven yang mengelilingi interaksi. Selain itu, Hubungan Inteernasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan meliputi segala seni hubungan internasional di antara berbabagai negara di dunia" (Perwita dan Yani, 2005 :4).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional tidak lagi fokus kepada isu-isu yang bersifat *high-politics* seperti keamanan, militer, perang dan politik. Namun, mulai berangsur bergeser kepada isu *low-politics* seperti lingkungan hidup, ekonomi, Hak Asasi Manusia dan terorisme. Teori ini mengkaji tentang interaksi antara kesatuan-kesatuan sosial, termasuk studi tentang keadaan-keadaan berkaitan yang mengelilingi interaksi. Penulis menggunakan teori ini untuk menjelaskan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat didalamnya, dalam hal ini Timor leste dan organisasi CPLP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste. Interaksi yang dilakukan oleh Timor Leste dan CPLP menghasilkan suatu bentuk kerjasama, maka dari itu penulis juga menggunakan Teori Kerjasama Internasional untuk melakukan analisa.

2.2.2 Organisasi Internasional

2.2.2.1 Pengertian Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka memcapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91) .

Berbagai definisi mengenai organisasi internasional dikemukakan untuk membantu memahami pentingnya peran dari organisasi internasional dalam pergaulan internasional dan diakui sebagai aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsifungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002: 3).

Organisasi internasional tumbuh karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat dunia terhadap perlunya suatu wadah untuk melaksanakan kerjasama internasional, dengan kata lain negara-negara menyadari perlu adanya organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Organisasi

internasional awalnya terjadi ketika terbentuk kesepakatan antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *Internasional Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovermental* yang disebut dengan hubungan internasional. Selain itu, menurut Clive Archer organisasi internasional juga merupakan organisasi yang formal, ditetapkannya struktur yang berkelanjutan melalui persetujuan di antara anggota-anggota, baik perwakilan dari pemerintah maupun bukan dari pemerintah yang setidaknya terdiri dari dua negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan dari para anggotanya (Perwita dan Yani, 2005:91- 92).

Bowett D.W. dalam bukunya *Hukum Organisasi Internasional*, mengakui tidak ada batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional. Walaupun demikian ia mencoba memberikan batasan dengan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multirateral dari pada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (1995: 25).

Subtansi pendapat tersebut bahwa organisasi internasional merupakan organisasi permanen berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Sesuatu hal yang

tidak mungkin dipisahkan dari organisasi yakni perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan seluruh organisasi didirikan atas perjanjian para pihak yang dalam konteks ini sebagai anggotanya.

Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization*/IGO) dan organisasi internasional nonpemerintah (*non-governmental organization*/NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum dan globalkhusus,regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*).

7. Bentuk dan pola kerja sama: kerja sama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *institutionalized alliance* dan kerja sama fungsional (*funcitional cooperation*).
8. Fungsi Organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. Organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secaran administartif (Rudy, 2002: 94-97).

Terbentuknya organisasi internasional karena adanya aktor-aktor dalam hubungan internasional yang sepakat dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama didasarkan pada perjanjian antara anggota-anggota dalam organisasi internasional, dalam hal ini organisasi CPLP terbentuk karena adanya kesamaan budaya antara setiap negara yang merupakan bekas jajahan portugis yang memiliki elemen pembudayaan bahasa Portugis senhingga didirikan organisasi CPLP. Dalam CPLP, bahasa Portugis menjadi jembatan untuk menghubungkan negara-negara yang terpisah jauh di antara berbagai benua guna mengeksplorasi kepentingan nasional yang menjadi prioritas dalam membangun kerjasama, demi menciptakan kemajuan dan pembangunan bagi masing-masing negara anggota dan juga CPLP sebagai salah satu organisasi regional. Maka dengan itu Timor Leate melakukan kerjasama dengan organisasi CPLP dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Leste.

2.2.2.2 Fungsi-fungsi Organisasi Internasional

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjankan fungsinya dengan baik, sehingga, tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional juga harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya.

Leroy Bannet dalam buku *Internasional Organizations, Principle and Issue,* mengemukakan bahwa :

> "Suatu organisasi internasional harus menjadi sarana kerjasama antara negara, yang mana kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Selain itu, organisasi internasional harus mampu menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar wilayah akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah, terutama ketika muncul suatu masalah"(1995: 9).

Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat di bagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu :

1. Artikulasi dan agregasi

   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, serta dapat mengartikulasikan kepentingan sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari

sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen

   Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

   Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antar wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi pemerintah dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat peraturan

   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintah dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc,*atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan peraturan

   Pelaksanaan keputusan organisasi hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan

pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pegesahan peraturan

   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapidengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

8. Informasi

   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *world bank* yang menyediakan dan UNICEF yang dilakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya (Archer, 1983: 69-78).

Menurut Clive Archer fungsi dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang

tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi dalam arti yang yang kedua ini, organisasi internasional mengacu ke arah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia (Perwita dan Yani, 2005:93).

Berdasarkan teori-teori yang ada bahwa fungsi suatu organisasi harus menjadi saran kerjasama antara negara-negara diman kerjasama tersebut mampu memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Berdasarkan fungsi yakni, koordinasi politik diplomatik, kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya sejak dibentuk CPLP setidaknya telah menjalankan peran dan fungsinya dalam membantu proses perkembangan demokrasi dengan mengirimkan misi-misi pengamat pemilihan umum ke Mozambique pada tahun 2003 dan Guinea Bissau tahun 2004. Selain itu, pada tahun 1998, CPLP telah ikut membantu proses penyelesaain krisis di Guinnea Bissau, Sao Tome dan Principe, serta membantu proses reformasi ekonomi di kedua negara tersebut. Di sisi lain, kontribusi CPLP dalam menciptakan perdamaian di Angola, Mozambique, dan Timor Leste dalam dua belas tahun terakhir telah mampu meningkatkan kerjasama multilateral antar sesama negara-negara anggota dan sampai saat ini CPLP masih membantu Timor Leste untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

2.2.2.3 Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut Clive Archer, istilah organisasi internasional umumnya untuk menjelaskan klasifikasi baik organisasi

antara pemerintah (*intergovernmental organizations*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*international nongovernmental organizations*) (Perwita dan Yani, 2005: 93).

2.2.2.3.1 Organisasi Antar Pemerintah *(Intergovernmental Organizations /IGOs)*

Menurut Edward H. Buehrig, *Intergovernmental Organizations* (IGOs) merupakan kumpulan atau anggotanya terdiri dari negara-negara. IGOs dibentuk oleh negara-negara untuk memudahkan dan mengatur hubungan di antara negara-negara. IGOs dapat dibentuk secara bilateral, regional atau juga universal. Umumnya IGOs memperoleh otoritas dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara walau pada saat sekarang. IGOs umumnya dibentuk di bawah pimpinan atau perlindungan dari organisasi-organisasi yang ada (Toma dan Gorman, 1991: 250). IGOs memiliki dana, pertemuan-pertemuan rutin, markas besar, dan sekretariat yang merupakan badan yang menjalankan program yang telah disusun oleh para anggotanya (Toma dan Gorman, 1991: 250-251).

Menurut Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku *Introduction to International Relations : Power and Justice*, IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya yaitu :

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuan bersifat umum:

Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contoh adalah PBB.

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuan terbatas :

   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *Internasional Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tapi tujuannya umum :

   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggun jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskla luas. Contohnya adalah Uni Eropa, organisasi negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuan terbatas :

   Organisasi ini di bagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Coulombis dan Wolfe, 1986: 281).

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sebagai organisasi internasional yang melibatkan antara negara beserta pemerintah di setiap negara anggota CPLP mempunyai kekuatan voting yang sama, yang tidak diukur berdasarkan jumlah sumbangan yang diberikan kepada organisasi. Selain itu, CPLP memiliki markas besar dan sekretariat, melakukan pertemuan rutin,

mengandalkan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan yang menjadi tanggug jawab badan kongres kepala negara dan Pemerintahan, Dewan Menteri-Menteri, dan Komite Tetap. Sejak pembentukannya pada tahun 1996, sehingga kerjasa yang telah disusun CPLP dengan negara anggota biasas di bahas dalam pertemuan rutin yang dilakukan dua tahun sekali, misalnya kerjasama CPLP dengan Timor Leste dalam meningkatkan kualitas pendidikan masih tetap dibahas dalam petemuan yang dilakukan setiap negara anggota, untuk melihat perkembangan kualitas pendidikan di Timor Leste, CPLP merupakan organisasi antara negara yang dibentuk untuk mempersatukan negara bekas koloni portugis dengan bahasa yang sama untuk melakukan kerjasama, baik berupa kerjasama bilateral dan multilateral yang telah digalang di antara negara-negara anggota di berbagai bidang, salah satunya kerjasama yang di Lakukan Timor Leste dengan CPLP dalam bidang pendidikan.

2.2.2.4 Peran Organisasi Internasional Dalam Sistem Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang di hadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai serana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005:95).

Peranan organisasi internasional dapat di bagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrument.

   Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena.

   Organisasi merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen.

   Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Menurut Leroy Bannet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu :

1. Menyediakan saran kerjasama di antara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antara pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bannet, 1995:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain dari pada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bannet, 1995:8).

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan,

larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsi dalam organisasi.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya. Pada awalnya kelompok manusia hidup dari hasil perburuan kelompoknya, setelah sumber buruan habis maka mereka pindah ke lokasi lain dengan cara hidup nomaden. Sejalan dengan perkembangan peradaban, mereka mulai hidup secara menetap pada satu tempat dan mulai mengenal bagaimana beternak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antarkelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang atau sekelompok kecil orangnya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2002:65-66).

Kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holti, 1987:651).

Selanjutnya Holsti memberi definisi kerjasama sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak;
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1987:652-653).

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelompok kecil yang kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar juga merupakan suatu bentuk organisasi pada

zaman dahulu. Kemudian dari sinilah mulai berkembang menjadi kerajaan atau negara sebagai perwujudan dari kelompok manusia yang lebih tertib dan teratur sebagaimana persyaratan sebagai suatu organisasi. Kemudian kerajaan atau negara dengan kerajaan atau negara lain saling berhubungan yang pada mulanya adalah hubungan perdagangan yang lama kelamaan berkembang serta meluas ke bidang-bidang lain seperti kebudayaan, politik, militer, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, terdapat keadaan yang memudahkan pencapaian tujuan masing-masing dan dalam konteks hubungan inilah sering terjadi benturan kepentingan diantara negara yang berhubungan, bahkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata, yang dalam sejarah dunia telah terbukti beberapa kali bahkan beratus kali terjadi peperangan antar bangsa (Rudy, 2002:66-67).

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. (Rudy, 2003:2).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang

semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional.

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam kerjasama internasional, adalah:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai

kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional, yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan diantara negara-negara terlibat (Smith & Hocking, 1995: 24).

2.2.3.1 Kerjasama Bilateral

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian;
2. Tukar menukar Duta Besar;
3. Kunjungan kenegaraan.

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008:85-87).

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Karena dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi, maka penulis akan membahas mengenai perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama.

Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan

terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

2.2.4 Pendidikan Dalam Studi Hubungan Internasional

Konteks pendidikan dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkna kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seprti isu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkungan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang trejadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (Asrudin, 2009: 34).

Fenomena hubungan internasional kini semakin mengarah pada persoalan sehari-hari penduduk dunia termasuk Timor Leste, yaitu pendidikan. karena pendidikan adalah merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia di sebuah Negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan dari sebuah negara akan berjalan dengan baik.

Maka keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) Menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan

kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan universal lebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan dalam Piagam PBB.

Pendidikan merupakan salah satu bidang utama UNESCO kegiatan. Sejak pembentukannya pada tahun 1945, Organisasi telah bekerja untuk meningkatkan pendidikan di seluruh dunia percaya itu menjadi kunci pembangunan sosial dan ekonomi. Organisasi ini bertujuan untuk membantu membangun dunia yang berkelanjutan dengan masyarakat hanya bahwa pengetahuan nilai, mempromosikan perdamaian, merayakan keragaman dan membela hak asasi manusia, dicapai dengan menyediakan Pendidikan untuk Semua.

Yang dekat hubungan dengan kementerian pendidikan dan mitra lainnya di 193 negara-negara tempat UNESCO di posisi kunci untuk menekan tindakan dan perubahan. Sektor Pendidikan terdiri dari anggota staf sekitar 400 di seluruh dunia. Mereka berbasis di kantor pusat UNESCO di Paris, di kantor lapangan dan Institut UNESCO dan Pusat khusus dalam pendidikan (http://www.unesco.-org/new/en/education/about-us/ diakses pada 23 Maret 2014).

Normatif instrumen PBB dan UNESCO berbaring kewajiban hukum internasional untuk hak atas pendidikan. Instrumen ini mempromosikan dan mengembangkan hak setiap orang untuk menikmati akses ke pendidikan berkualitas baik, tanpa diskriminasi atau pengucilan. Instrumen ini menjadi saksi penting bahwa Negara Anggota dan komunitas internasional untuk bertindak normatif melampirkan untuk mewujudkan hak atas pendidikan.

2.2.5. Kualitas Pendidikan

Dahlan Al-Barry mendefenisikan kata kualitas dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu, baik buruknya barang”. Seperti halnya yang dikutip oleh Quraish Shihab yang mengartikan kualitas sebagai tingkat baik buruk sesuatu atau mutu sesuatu. Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. (Al Barry, 2001: 329).

Pendidikan sebagai usaha sadar memerlukan. Tampa tujuan,pelaksanaan pendidikan akan acak-acak. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang di harapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka baik hukum dan politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan bagi semua kualitas yang baik dan untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan adalah alat yang ampuh dimana orang dewasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dan anak-anak dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga egara**.**

Tujuan pendidikan mengarah pada kondisi yang diharapkan setelah terjadinya proses pendidikan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan hidup seseorang dan kehendak negra tempat ia hidup. Pandangan hidup manusia tentang

tujuan pendidikan berbeda dengan tujuan pendidikan yang di anut kaum kapitalis,misalnya. Tujuan pendidikan suatu Negara berbeda pula dengan tujuan pendidikan di Negara lain. Akan tetapi,walaupun tujuan pendidikan di berbagai Negara itu berbeda-beda,ada satu tujuan yang disepakati,yaitu manusia cerdas,terampil, dan menjadi warga Negara yang baik.

Pendidikan yang berkualitas seperti yang dikemukakan Dr. H. Dody dan Ace Suryadi yaitu ada tiga macam sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan pendidikan yang bermutu : tujuan tersebut harus tanpak, empiris, dan terukur. Hal ini di karenakan ilmu itu harus logis dan empiris.
2. Sumber tujuan pendidikan : tujuan pendidikan bias berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan pandangan hidup masyarakat dan masyarakat lainnya walaupun tujuan pendidikan di berbagai negara itu berbeda-beda,ada satu tujuan yang disepakati,yaitu manusia cerdas,terampil, dan menjadi warga Negara yang baik. Kehendak negara dan agama bias dijadikan sebagai sumber bagi tujuan pendidikan.
3. Klasifikasi tujuan pendidikan : dalam teori ilmu pendidikan, ada lima kategori tujuan pendidikan yaitu tujuan umum, tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, dan tujuan khusus. Semua tujuan tersebut mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. (Dody & Suryadi, 2013 : 47-49).

Untuk memajukan suatu negara yang lebih diandalkan dalam kehidupan negara adalah Sumber Daya Manusia. Kehidupan negara yang sedang dalam

proses pembangunan dibutuhkan Sumber daya manusia yang cukup berkualitas untuk dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam proses pembanguna negara. Kemerdekaan Timor Leste untuk kebebasan sebagai negara dalam konteks pembebasan tanah air sudah didapatkannya, namun pada konteks ini tidak lepas dari sebuah pembebasan dari pembodohan dan kemiskinan masih tergolong minim sehingga perlu adanya upaya – upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa memberikan suatu kontribusi pada negaranya.

Sedangkan kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks "proses" pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. (Suryadi & Tilaar, 1993: 159).

Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sektor pendidikan menjadi salah satu modal yang paling utama dalam proses pembagunan suatu negara sesuai dengan proses perkembangan pendidikan di suatu negara sesuai dengan pengimplementasian program sistem pendidikan dan kurikulum yang dapat menjamin proses pendidikan yang mampu berikan suatu perubahan yang betul – betul berpihak pada masyarakat atau warga negaranya.

Sedangkan menurut Wayne & Miskel menjelaskan bahwa mutu atau kualitas pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan (Wayne & Miskel, 2001: 15).

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan

dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Margono berpendapat agar mutu atau kualitas pendidikan yang baik dapat tercapai, maka mutu tersebut harus didukung oleh sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah "sekolah yang secara keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)". Pendapat ini cukup beralasan, karena terlalu banyak pengelolaan sekolah, yang mengabaikan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga hasilnya pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih peluang dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan fungsinya.(Margono, 2005: 25).

Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang.

Suryadi menjelaskan kualitas atau mutu pendidikan dapat juga diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai tujuan kurikulum (*objective of curriculum)*yang dirancang untuk pengelolaan pembelajaran siswa. Konsep ini lebih menekankan kepada pengawasan dalam pencapaian tujuan kurikulum pembelajaran, sehingga indikator umumnya adalah semakin tujuan kurikulum

tercapai, maka dapat dikategorikan suatu pendidikan yang bermutu. Ditegaskan lebih jauh bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Analisis konsep ini lebih menekankan kepada kinerja lembaga, yaitu kecenderungan semakin efektif dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dan semakin baik hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan pendidikan tersebut memiliki mutu yang baik. (Suryadi & Tilaar, 1993:159).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memilki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

Diharapkan dengan adanya kerjasama CPLP dengan Pemerintah Timor Leste dengan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan individu ataupun kualitas pendidik di Timor Leste yang masih kurang kualitas pendidikannya karena ketidak adanya fasilitas dan kurang tenaga pengajar unutk pendidikan di Timor Leste, dan diharapkan dengan adanya program CPLP memberikan hasil dari ini berdampak baik pada proses pembangunan nasional Timor Leste.